

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bab ini merupakan kesimpulan dari penulisan skripsi yang berjudul “Peranan Aung San Suu Kyi Dalam Memperjuangkan Demokrasi di Myanmar tahun 1988-2010”. Kesimpulan tersebut merujuk pada jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dikaji oleh penulis di dalam bab sebelumnya. Terdapat empat hal yang penulis simpulkan berdasarkan permasalahan yang dibahas, yaitu:

Pertama, kondisi sosial politik di Myanmar pada masa pemerintahan junta militer. Pemerintahan junta militer Myanmar berlaku semenjak Jenderal Ne Win melakukan kudeta terhadap Perdana Menteri U Nu pada tahun 1962. Di bawah kekuasaan Ne Win, sistem politik Myanmar berubah dari demokrasi parlementer menjadi “Jalan Myanmar menuju Sosialisme”. Partai politik banyak dibubarkan dan hanya berdiri satu partai tunggal dengan nama BSPP. Myanmar terisolasi dari dunia luar karena Ne Win ingin Myanmar menjadi bangsa mandiri dengan menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang mengakibatkan para pengusaha asing yang kebanyakan dari etnis Cina terpaksa pergi meninggalkan Myanmar. Selain itu, segala hal yang berbau Barat dilenyapkan dari Myanmar karena kekhawatiran terhadap pengaruh tersebut akan mengancam dan mempengaruhi kekuasaannya. Namun, keinginannya menjadikan Myanmar sebagai bangsa mandiri malah berakibat pada munculnya permasalahan-permasalahan baru, seperti munculnya *black market* dan banyaknya korupsi yang dilakukan pejabat militer.

Pemerintahan junta militer masih berlanjut meskipun peristiwa demonstrasi berdarah pada tanggal 8 Agustus 1988 berdampak pada kudeta terhadap Ne Win. Pemerintahan terus berlangsung di bawah pimpinan Maung Mang yang sedikit memberi celah bagi terbukanya demokratisasi di Myanmar dengan keputusan akan membubarkan partai pemerintah dan menggantinya dengan pemerintahan sipil. Namun, kudeta kembali terjadi dan Jenderal Saw Maung menggantikan posisi Maung

Maung. Di bawah pemerintahan Saw Maung, Myanmar kembali pada sistem pemerintahan mengandalkan militer sebagai panglima dengan dibentuknya pemerintahan bernama SLORC (Dewan Hukum dan Restorasi Negara) dan dikeluarkannya hukum *Martial Law* yang mengizinkan dilakukannya hukuman mati tanpa proses peradilan terhadap siapa saja orang yang dianggap mengancam keamanan dan perdamaian negara. Hukum tersebut sebenarnya hadir untuk mengancam dan menakut-nakuti rakyat agar tidak melakukan protes terhadap pemerintah. Saw Maung kemudian mengundurkan diri, dan digantikan oleh Jenderal Than Shwe juga merupakan orang militer. Namun Than Shwe hanya menjabat sebagai ketua partai dan menunjuk Khin Nyunt, Soe Win hingga Thein Shein untuk menjadi pimpinan negara. Akan tetapi keberadaan mereka hanya dianggap sebagai boneka Than Shwe.

Kedua, kedatangan kembali Aung San Suu Kyi ke Myanmar yang awalnya hanya untuk merawat ibunya yang sakit, berubah ketika ia menyaksikan kondisi sosial, politik dan ekonomi Myanmar semakin jauh dari apa yang ayahnya cita-citakan. Kemudian, Suu Kyi memutuskan untuk melakukan gerakan menuntut kebebasan bagi rakyat dan perubahan sistem politik pemerintah agar lebih demokratis. Konsep pemikirannya tentang gerakan demokrasi terilhami dari cita-cita Aung San dan gerakan tanpa menggunakan kekerasan dari Mahatma Gandhi. Suu Kyi mengirimkan surat terbuka kepada pemerintah pada tanggal 15 Agustus 1988 menuntut untuk membentuk tim penasihat yang ahli dalam bidang sosial, politik, pendidikan dan ekonomi guna menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi Myanmar, serta menuntut adanya pemilu dengan sistem multipartai. Kemudian Suu Kyi juga melakukan orasi di depan Pagoda Shwedagon pada tanggal 26 Agustus 1988 yang membuat seluruh rakyat yang menyaksikannya kagum dengan sosok dan cara bicaranya yang seperti ayahnya. Lalu Suu Kyi membentuk partai NLD bersama Aung Gyi dan U Tin U yang merupakan mantan pejabat pemerintahan militer. Suratnya yang dikirimkan ke Amnesti Internasional dan para duta besar negara-negara anggota PBB perihal masalah pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar jatuh ke tangan

pemerintah dan ini membuat mereka geram. Saat pemilu diumumkan akan dilaksanakan pada Mei 1989, Suu Kyi dan rombongan partai NLD melakukan kampanye ke berbagai tempat di Myanmar, sampai ke daerah-daerah pedalaman yang masih dihuni oleh suku-suku asli.

Ketiga, saat melakukan kampanye, banyak hambatan-hambatan yang dialami Suu Kyi dan rombongannya. Tentara pemerintah selalu muncul dan membayangkan perjalanan, bahkan pernah ada upaya pembunuhan terhadap Suu Kyi secara langsung yang dilakukan tentara pemerintah. Tetapi, upaya tersebut gagal karena mental tentara pemerintah yang kalah bernyali dengan Suu Kyi yang menghadapi mereka hanya dengan tangan kosong. Pemerintah akhirnya menahan Suu Kyi dengan status tahanan rumah dan menangkap rekan-rekan NLD lainnya serta memenjarakan mereka di penjara Insein. Dengan status tahanan rumah yang diberlakukan pemerintah, Suu Kyi terpaksa tidak dapat berpartisipasi dalam pemilu 1990. Namun, hal ini tidak mempengaruhi rakyat untuk tidak memilih NLD, sehingga pemilu tersebut dimenangkan oleh NLD dengan kemenangan telak sebesar 80,82 persen. Anggota NLD yang terpilih seharusnya bisa duduk di parlemen sesuai aturan hasil pemilu yang berlaku, namun pemerintah menolak hasil tersebut dengan mengelak bahwa pemilu tersebut dilakukan bukan untuk menghasilkan anggota parlemen, namun membentuk Konvensi Nasional dengan tujuan sebagai proses demokratisasi di Myanmar. Partai NLD menolak menghadiri konvensi berkali-kali sebelum diadakannya dialog membahas perihal pembebasan Suu Kyi. Kecaman dan sanksi ekonomi terhadap Myanmar pun bermunculan.

Akhirnya Suu Kyi dibebaskan pada tahun 1995 dan kembali menjalankan kegiatan politiknya, namun pada tahun 2000 terjadi kembali penahanan terhadap dirinya dan beberapa orang NLD. Dua tahun kemudian dibebaskan setelah perwakilan PBB meminta pemerintah junta militer melakukan dialog dengan Suu Kyi. Pada tahun 2003, ketika Suu Kyi beserta rombongannya melakukan perjalanan ke desa Depayin, daerah Kachin, terdapat sekumpulan tentara yang menyerang rombongan. Peristiwa ini mengakibatkan penahanan kembali Suu Kyi sebagai

tahanan rumah untuk ketiga kalinya. Tindakan pemerintah yang berusaha menekan dan melumpuhkan Suu Kyi untuk berhenti melakukan gerakan demokrasi sama sekali tidak mempengaruhinya ketika ia harus dipenjara. Penjara di dalam rumah, sama sekali tidak membuatnya depresi atau berniat mundur dari gerakan demokrasi yang dilakukannya. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa kerinduan terhadap keluarganya yang dilarang mengunjunginya sangat terasa, namun Suu Kyi tidak menyebut hal ini sebagai pengorbanan terbesar, karena ia tidak sendiri dan banyaknya pengorbanan orang lain yang lebih berat dari dirinya. Hal ini semakin membuat dunia internasional geram dan menambah sanksi ekonominya terhadap Myanmar. Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa terus melakukan sanksi ekonominya, tetapi Cina dan Thailand yang sudah melakukan hubungan sejak lama dengan Myanmar tidak mengindahkan hal tersebut.

Keempat, pemilu kembali dilakukan di Myanmar pada tahun 2010. NLD menolak ikut bergabung karena aturan dalam pemilu yang banyak merugikan NLD. Pemilu tersebut dimenangkan oleh partai pemerintah USDP dan membuat Thein Shein menjadi presiden Myanmar. NLD memboikot pemilu tersebut karena dicurigai terjadi kecurangan dalam prosesnya yang dilakukan partai pemerintah, karena tidak adanya pemantau dan jurnalis asing yang boleh memantau jalannya pemilu. Masa tahanan Suu Kyi yang seharusnya habis sebelum tahun 2010, kemudian diperpanjang karena menolong dan memberi tempat menginap selama beberapa hari kepada seorang pria Amerika yang berenang dari danau Inya menuju rumah Suu Kyi. Hal ini membuat geram pemerintah dan memutuskan memperpanjang masa tahanan rumahnya, sehingga Suu Kyi tidak bisa ikut serta dalam pemilu yang diadakan tahun 2010.

Suu Kyi kembali dibebaskan untuk ketiga kalinya pada tanggal 30 November 2010. Ia diijinkan untuk kembali melakukan aktivitas politik di Myanmar. Pada tahun 2012, diadakan kembali pemilu untuk pemilihan anggota parlemen. Pemilu kali ini lebih bebas dan terbuka, karena jurnalis asing dan lokalizinkan untuk memantau meskipun dengan batas waktu yang relatif singkat. NLD memenangkan pemilu dan

memenangkan 43 kursi dari total 45 kursi yang disediakan di parlemen. Akhirnya, Suu Kyi dan anggota NLD terpilih lainnya dilantik menjadi anggota parlemen, walaupun pada awalnya Suu Kyi bersikeras menolak pelantikan sebelum satu kata dalam sumpah diganti. Dengan kehadiran Suu Kyi dan anggota NLD lainnya di dalam parlemen, membuat semakin terbukanya peluang demokratisasi di Myanmar. Dengan kebebasan yang sudah diperolehnya, Suu Kyi bekerja di dalam parlemen demi terciptanya demokrasi dalam sistem politik Myanmar, meskipun orang-orang militer dan partai pemerintah masih menguasai suara yang besar terhadap setiap keputusan parlemen. Suu Kyi mendapatkan banyak kunjungan dari tokoh-tokoh dunia, salah satunya adalah perdana Menteri Inggris, David Cameron. Kunjungan ini dimanfaatkan Suu Kyi untuk meminta Inggris dan negara Uni Eropa lainnya mencabut sanksi ekonomi terhadap Myanmar. Suu Kyi juga melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa takut tidak bisa kembali ke Myanmar. Kunjungannya ke Amerika Serikat dan bertemu Presiden Barack Obama memberi pengaruh yang besar terhadap dicabutnya sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Myanmar.

Penguasa junta militer di Myanmar sudah beberapa kali silih berganti, namun gerakan demokrasi yang dilakukan Suu Kyi tidak pernah padam sejak tahun 1988. Meskipun penjara rumah bertahun-tahun dan terisolasi dari dunia luar harus dihadapinya, tetapi Suu Kyi tetap hidup dalam semangat revolusinya untuk melakukan perubahan di Myanmar. Dengan kebebasan yang diperolehnya setelah bebas sebagai tahanan rumah dan kedudukannya sebagai anggota parlemen, membuat semakin terbukanya proses demokratisasi di Myanmar. Kedudukannya di parlemen, diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan yang selama ini diinginkan rakyat Myanmar. Keberadaan dan peranan Suu Kyi sebagai tokoh yang terkenal dan disegani oleh pemimpin dunia, juga diharapkan dapat membawa dampak positif agar semakin terbuka dan membaiknya citra Myanmar di dunia internasional.

5.2 Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan menjadi sumber pembelajaran sejarah di sekolah khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Materi dari penelitian ini sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) kelas XII jurusan IPS yakni “Menganalisis perkembangan sejarah dunia sejak Perang Dunia II sampai dengan perkembangan mutakhir”, dengan Kompetensi Dasar (KD) yaitu “Menganalisis perkembangan sejarah dunia Indonesia di tengah perubahan politik dan ekonomi internasional setelah Perang Dunia II sampai dengan berakhirnya Perang Dingin”. Pembahasan Myanmar sebagai negara yang sama-sama berada dalam satu wilayah kawasan Asia Tenggara dengan Indonesia, diharapkan dapat menjadi materi pembelajaran sejarah sesuai dengan SKKD tersebut. Myanmar dan Indonesia merupakan negara berkembang yang juga pernah mengalami gejolak politik. Selain itu, ideologi-ideologi yang bermunculan pasca Perang Dingin seperti demokrasi yang diusung dari pihak Amerika, dan komunis dari Rusia, mempengaruhi negara-negara lainnya, termasuk ke Myanmar dan Indonesia.

Selain itu, melalui penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya melalui kerangka berpikir penulis mengenai pembahasan yang belum dipecahkan atau belum diungkap secara jelas dalam penelitian ini. Keterbukaan Myanmar terhadap dunia internasional menjadi hal yang bermanfaat, namun masih banyak hal yang harus dibenahi di dalam negeri. Masih banyak masalah-masalah di dalam negeri yang harus diselesaikan, seperti pertentangan kaum etnis yang sejak dulu terjadi di Myanmar masih banyak terjadi. Terutama masalah pertentangan yang terjadi antara kaum Muslim dan kaum Buddha di daerah Arakan (Rakhine). Masalah-masalah pertentangan antar etnis dan lintas agama ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan anggota parlemen. Suu Kyi sebagai orang yang kini duduk di parlemen, juga ikut bertanggung jawab akan hal tersebut. Selain menangani masalah-masalah etnis yang masih berkejolak, jajaran pemerintahan Myanmar juga diharapkan dapat mempertahankan sistem politik yang demokratis dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya

agar lebih sejahtera. Tantangan pemerintah juga akan semakin meningkat untuk ke depan.

